



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 003/07012009
HARI : RABU
TANGGAL : 7 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	AGRESI MILITER: Israel Abaikan Seruan Internasional	3
	President Yudhoyono says Indonesian press among freest in Asia	4
	ASEAN Jadi Prioritas Diplomasi Tahun 2009	4
	UNESCO to name batik as an Indonesian cultural heritage in May	6
	RI Desak Majelis Umum PBB Gelar Sidang Darurat	6
	Indonesia belum Pasti Kirim Pasukan ke Palestina	7
	Pendemo Blokir KTT ASEAN	7
	RI Sponsori Sidang Majelis Umum	8
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Jihadists the last thing Gaza needs: Minister	10
	B. EKONOMI	
	Presiden: Coret Proyek yang Tak Ciptakan Lapangan Kerja	10
	Ekspor 2009 Anjlok: Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Pertumbuhan	11
	Ekspor Perikanan Naik 13,3%	11
	C. SOSBUD	

		2009 another 'tough year' for human rights campaign	12
	D.	HANKAM	
		Dubes RI "Camping" di Barak Konga	13
		KRI Teuku Umar Gagalkan Pembajakan	13
	E.	HUKUM	
		PREDIKSI YLBHI: Penegakan HAM 2009 Makin Buruk	13
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	--
	III.	ARTIKEL	
		Responses to Gaza crisis: Self-restraint is needed (by Al Makin)	14
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Bola di Tangan Pakistan	16

Jakarta, 7 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. AGRESI MILITER: Israel Abaikan Seruan Internasional

Sejumlah delegasi Arab bertemu dengan Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa, untuk mendesak negara-negara anggota mengadopsi resolusi yang menyerukan diakhirinya serangan Israel ke Gaza dan menerapkan gencatan senjata secara permanen.

Israel sendiri mengabaikan seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata, dan menyatakan pihaknya tidak akan menyudahi serangan ke Gaza sampai militan Hamas menghentikan serangannya ke wilayah Israel.

Menlu RI Hassan Wirajuda mengaku skeptis proses diplomasi di Dewan Keamanan PBB dapat menghasilkan resolusi yang bisa memaksa Israel menghentikan serangan. "Struktur Dewan Keamanan PBB tidak memungkinkan hal itu," katanya saat menyampaikan pernyataan pers tahunan, di Jakarta, Selasa.

Dia lebih memilih sidang darurat di Majelis Umum PBB, yang anggotanya mencakup seluruh negara dan tidak ada veto dari negara tertentu. "Perwakilan kita di sana masih melakukan lobi untuk mengajukan sidang darurat," ujarnya.

Menlu menghitung, anggota PBB saat ini sebanyak 192 negara, dan 117 di antaranya adalah anggota Gerakan Non-Blok (GNB). "Makanya kalau seluruh anggota GNB satu suara saja, itu sudah melebihi mayoritas suara di Majelis Umum PBB," katanya.

Dia mengakui, usulan sidang darurat itu dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB gagal mewujudkan tanggung jawabnya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti tercermin dalam dua kali sidang informal DK PBB dalam seminggu terakhir.

"Sidang informal itu hanya menghasilkan pernyataan pers, itu pun bukan resmi, padahal situasi di lapangan saat ini lebih dari 500 orang tewas," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York sedang mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai "Uniting for Peace Resolution".

Sekalipun keputusan sidang Majelis Umum tidak mengikat sebagaimana resolusi Dewan Keamanan PBB, Menlu menekankan, mengingat kegagalan DK PBB mencapai kesepakatan, maka sudah waktunya Majelis Umum melakukan sesuatu untuk memberikan tekanan moral pada pihak-pihak yang menghindar bertanggung jawab.

Selain menggunakan jalur diplomasi untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel di Jalur Gaza sejak 27 Desember 2008, pemerintah Indonesia juga menjanjikan bantuan uang tunai senilai 1 juta dolar AS serta bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan perlengkapan.

Ditanya soal keinginan sejumlah kalangan mengirimkan relawan ke Gaza, Menlu menilai masyarakat internasional tidak menilai agenda itu sebagai satu pilihan bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat sipil di Jalur Gaza. "Agenda pengiriman sukarelawan untuk bertempur di Jalur Gaza bukan suatu opsi dari masyarakat internasional," katanya.

Menurut Menlu, saat ini masyarakat internasional melalui jalur diplomasi sedang mengupayakan tercapainya gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Dia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin malam telah menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdavi, guna menanyakan bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina.

Dubes Palestina Fariz Mehdavi menyebutkan, yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah obat-obatan dan peralatan kesehatan.

Mengenai keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk mengirimkan sukarelawan guna bertempur di Palestina, Menlu mengatakan, pemerintah menghargai hal tersebut. "Tapi, kita juga perlu sependapat bahwa dukungan, bantuan dan simpati yang kita berikan adalah efektif," katanya.

Presiden Yudhoyono sendiri meminta masyarakat tetap mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum berangkat ke kota Gaza untuk membantu warga Palestina yang diserang oleh pasukan Israel.

Presiden menegaskan, dalam kasus warga Palestina di Gaza, pemerintah memutuskan kebijakan untuk bisa memberikan sumbangan dengan tetap menjaga keselamatan warganya.

"Tujuan kita membantu, mewujudkan solidaritas dengan cara-cara yang tepat. Jadi, pilihlah cara-cara yang bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi masalah," katanya.

Dari Gaza dilaporkan, pasukan Israel kini telah menguasai gedung-gedung bertingkat dan menghancurkan sejumlah terowongan serta mesjid dalam operasi militer terhadap militan Hamas tersebut. PBB menyatakan sedikitnya 600 orang tewas, sebagian dari mereka adalah warga sipil.

Dalam pertempuran Selasa, sedikitnya 18 orang tewas. Demikian diinformasikan oleh petugas rumah sakit lokal. Namun, hanya dua orang yang sudah dipastikan bahwa mereka adalah militan.

PM Israel Ehud Olmert menolak gencatan senjata dengan alasan operasi itu dilakukan untuk menghentikan serangan roket Hamas. "Operasi ini bertujuan agar Hamas menghentikan penembakan," kata Olmert setelah bertemu dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. (Suara Karya)

2. President Yudhoyono says Indonesian press among freest in Asia

In President Susilo Bambang Yudhoyono's view, the press in Indonesia is one of the freest in Asia, presidential spokesman Andi Mallarangeng said here on Tuesday.

"According to the president, the press is one of the pillars of democracy, and Indonesia can pride itself in the fact that its press is among the freest in Asia," Mallarangeng said after accompanying the president at a meeting with top executives of the Globe Media Group at the presidential office here on Tuesday.

Quoting the president, Mallarangeng said unlike other Asian countries, Indonesia now no longer had any rules restricting freedom of the press.

Therefore the president expressed hope that the Indonesian press would be a benchmark in the Asian region.

President Yudhoyono had also said that news reports in Indonesia were no longer censored and therefore the press had become freer and fairer in providing information to develop the nation's mentality.

The president, according to Mallarangeng, supported the existence of independent media that enlightened the people.

He said the president also welcomed the new emerging media in Indonesia as an industry that created job opportunities for the people.

"It is not correct to categorize the press in Indonesia as a 'sunset industry'. Indonesia is an 'emerging country', a developing country with a developing media industry," Mallarangeng said citing the president.

Meanwhile, Jakarta Globe manager Sigit Pramono said that at his meeting with President Yudhoyono, he had reported about the Globe Media Group's activities, including the recent launching of an English-language daily called The Jakarta Globe.

Sigit said it was the Globe Media Group's hope that the The Jakarta Globe would be a medium to make Indonesia better known to English-speaking readers. (ANTARA)

3. ASEAN Jadi Prioritas Diplomasi Tahun 2009

Jakarta, Kompas - Setelah Piagam ASEAN resmi berlaku pada akhir tahun 2008, aktivitas diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2009 akan diprioritaskan pada persiapan infrastruktur ASEAN. Prioritas lain adalah merespons potensi dampak serius krisis finansial global.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam Pernyataan Pers Tahunan, Selasa (6/1) di Jakarta, mengatakan, persiapan infrastruktur ASEAN meliputi penyelesaian cetak biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. "Cetak biru itu disertai rincian kegiatan dan kerangka waktu yang jelas," kata Hassan.

Selain cetak biru, Indonesia juga menargetkan penyelesaian kerangka acuan (term of reference) Badan Hak Asasi Manusia ASEAN pada Juli 2009. "Sebagai anggota ASEAN terbesar dan tuan rumah Sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peran penting dalam proses transformasi ASEAN," ujar Hassan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Februari 2009. KTT ASEAN yang seharusnya dilaksanakan pada Desember 2008 di Chiang Mai, Thailand, batal karena situasi politik dalam negeri negara itu.

Pada KTT ASEAN 2009 akan ditandatangani Chiang Mai Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (CMDRAC) 2009-2015 menggantikan Vientiane Plan of Action. CMDRAC akan menjadikan ASEAN sebagai "kawasan yang damai, demokratis, terbuka, adil, transparan, toleran, inklusif, harmonis dengan pasar dan basis produksi tunggal, serta berorientasi kepada masyarakat".

Dari Bangkok dilaporkan, para pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Selasa, mengungkapkan rencana untuk menghalangi KTT ASEAN 2009. Mereka mengancam tidak akan membiarkan Pemerintah Thailand menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

"Kami akan menulis kepada semua duta besar ASEAN untuk menyampaikan pesan bahwa kami tidak akan membiarkan Menlu Kasit Piromya menjadi tuan rumah," kata Jatuporn Prompan, pemimpin kelompok pro-Thaksin, seperti dikutip AFP.

Pasar baru

Menanggapi krisis finansial global yang akan mendera dalam jangka waktu cukup panjang, aktivitas diplomasi Indonesia tahun 2009 juga difokuskan pada upaya meningkatkan, memperluas, atau mencari pasar-pasar nontradisional baru, seperti Rusia, Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin.

"Hal itu penting untuk memastikan kelanjutan ekspor Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi," kata Hassan.(Kompas)

4. UNESCO to name batik as an Indonesian cultural heritage in May

The government announced Tuesday UNESCO would soon name batik, Indonesia's traditional practice of dying cloth through wax resist methods, as an intangible cultural heritage.

"According to plan, UNESCO will officially name batik as a cultural heritage in May this year," said Indroyono Soesilo, secretary to the coordinating minister for people's welfare, as quoted by state news agency Antara on Tuesday.

Getting batik to be recognized by UNESCO had been a long and complex journey, Indroyono said. The Indonesian government had to produce extensive academic research on batik, he said, to make their case.

"We must be grateful that the work of our ancestors will be acknowledged by the world," he said.

So far, Indonesia has registered nine of its places and practices with the UN's educational, scientific and cultural guardian. Two other cultural heritages are wayang puppetry and the kris. World heritages sites include natural ones such as Komodo National Park, Tropical Rainforest of Sumatra, and historic sites such as the Borobudur and Prambanan temple compounds and the Sangiran Early Man archeological site. (The Jakarta Post)

5. RI Desak Majelis Umum PBB Gelar Sidang Darurat

Indonesia mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) menggelar sidang darurat untuk menghentikan serangan Israel ke Jalur Gaza.

Desakan tersebut dilakukan karena Dewan Keamanan (DK) PBB gagal menyepakati resolusi gencatan senjata untuk menghentikan serangan di Jalur Gaza yang telah menewaskankedikitanya 560orang. Indonesia, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, telah melobi negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan anggota PBB lain untuk mendukung proposal sidang darurat tersebut. Dia optimistis lobi intensif tersebut bakal berhasil.

“GNB beranggotakan 117 negara, sedangkan anggota PBB 192 negara. Maka diperlukan mayoritas sebanyak-banyaknya untuk menggelar sidang darurat MU PBB,” tandas Menlu di Jakarta kemarin. Upaya diplomasi di DK PBB sering menemui jalan buntu karena resolusi gencatan senjata yang diajukan sejumlah negara selalu dimentahkan atau diveto negaranegara anggota tetap DK PBB. Wirajuda optimistis seluruh anggota GNB akan menyetujui proposal RI karena sejak awal posisi GNB adalah mendukung perjuangan Palestina. Demikian pula negaranegara anggota PBB lain.

Menlu menjelaskan, Biro Koordinasi GNB di New York sedang mengambil inisiatif mendesak sidang darurat MU PBB atas dasar Pasal 51 Piagam PBB mengenai resolusi perdamaian. Selain itu, perwakilan RI di New York telah menyampaikan surat mengenai usul penyelenggaraan sidang darurat tersebut. “Kini surat dari Pemerintah Indonesia sudah beredar ke negara-negara anggota GNB di New York,” ungkap Menlu. Menlu menilai, DK PBB gagal mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut terlihat dalam dua sidang informal DK PBB dalam seminggu terakhir.

“Sidang informal itu hanya menghasilkan pernyataan pers, itu pun bukan resmi, padahal situasi di lapangan saat ini lebih dari 500 orang telah menjadi korban,” cetus Menlu. Selain itu, dia mencatat dari pengalaman dua kali agresi Israel ke Palestina, pertemuan DK PBB selalu gagal. Menlu juga menyinggung soal sikap beberapa negara Arab yang berharap usul itu ditunda hingga sidang DK PBB hari ini.

Negara-negara Arab masih berharap DK PBB dapat menghasilkan suatu resolusi mengenai gencatan senjata dan penghentian agresi Israel ke Palestina. “Hingga saat ini, saya pesimistis mengenai usulan negara Arab,”paparnya. Wirajuda mengungkapkan dunia internasional tidak bisa berdiam diri menyaksikan agresi Israel berlanjut di Gaza. Jika tidak dihentikan, korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil bakal bertambah ratusan lagi jumlahnya.

DK Buntu Lagi

DK PBB kemarin kembali bertemu membahas desakan Liga Arab untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan perlindungan rakyat sipil Palestina. Menlu Prancis Bernard Kouchner yang saat ini menjadi Presiden DK PBB yang beranggotakan 15 negara memimpin pertemuan.

Namun pertemuan itu diperkirakan akan mengalami kebuntuan karena sikap keras kepala Amerika Serikat (AS) yang menolak draf resolusi usulan negara-negara Arab. “Prancis bekerja sama dengan negara-negara Arab untuk menyelesaikan draf resolusi yang akan menyerukan gencatan senjata segera, khususnya untuk mengakhiri serangan militer Israel serta penembakan roket ke Israel oleh pejuang Hamas,” ujar seorang sumber diplomat Barat.

Draf resolusi juga mendesak pencabutan blokade Israel di Gaza untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan menjangkau warga Palestina. “Selain itu, draf berisi upaya melindungi warga sipil, mengembalikan proses perdamaian Israel-Palestina, dan mekanisme untuk memonitor gencatan senjata serta melindungi warga sipil,” ujar para diplomat lain. Israel telah menutup perbatasannya dengan Gaza selama agresi militer terjadi. Zionis tidak mengizinkan pergerakan ke dan dari wilayah yang kini berubah menjadi medan perang tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (5/1) telah bertemu dengan delegasi menteri-menteri luar negeri Arab yang dipimpin oleh Kepala Liga Arab Amr Mussa. Dalam pertemuan itu mereka menyatukan pandangan tentang perlunya DK PBB “bertindak tegas dan cepat” untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza akibat agresi Israel. “Kita harus mendesak Israel mengakhiri serangan militernya yang jelas sangat berlebihan,” ujar Ban kepada menteri-menteri Arab.

Hingga saat ini, lebih dari 560 warga Palestina, termasuk 90 anak-anak, tewas akibat serangan brutal Israel dalam Operation Cast Lead di Gaza pada 27 Desember lalu. Lebih dari 2.500 orang terluka akibat gempuran mesinmesin perang Israel terhadap warga sipil. Namun ironisnya, hingga saat ini DK PBB belum bisa memaksa Israel untuk menghentikan serangan terornya. “Kita harus mendesak Hamas mengakhiri serangan roket (ke Israel) yang juga sangat kontraproduktif dan tidak dapat diterima. Di sana harus ada gencatan senjata segera, yang bertahan lama dan dihormati sepenuhnya oleh seluruh pihak,” tegas Ban.

Ban menyatakan, dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan untuk mendiskusikan mekanisme yang dapat dilakukan untuk melindungi rakyat Palestina. "Kita juga mendiskusikan bantuan kemanusiaan dan cara pencegahan situasi kian buruk," ujar Sekjen PBB itu.

Ban juga mengatakan bahwa dia akan membuat sejumlah poin untuk Presiden AS George W Bush selama pertemuan Gedung Putih kemarin pagi. Setelah bertemu dengan Ban, delegasi menteri-menteri Arab bertemu secara terpisah dengan lima anggota tetap DK PBB, yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS serta dengan 10 anggota tidak tetap DK PBB. (Koran Sindo)

6. Indonesia belum Pasti Kirim Pasukan ke Palestina

Rencana pengiriman pasukan TNI ke wilayah konflik di Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari misi perdamaian PBB hingga kini belum dapat dipastikan.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Medan, Selasa (6/1), mengatakan hingga kini pihaknya belum mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik itu, meski ada rencana ke arah itu.

"Belum ada (pengiriman TNI ke Palestina, red) dan sampai saat ini baru sebatas rencana," ujarnya menjawab wartawan didampingi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah di Pangkalan TNI AU Medan untuk meresmikan Monumen Perjuangan Legiun Veteran RI Sumut.

Menurutnya, jika ada permintaan dari PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian, maka Indonesia akan menyiapkan pasukan.

Karena sebelumnya Indonesia juga telah berperan dan berpengalaman ketika mengirimkan pasukan TNI untuk misi perdamaian ke kawasan itu dan beberapa negara lain yang juga dilanda konflik. "Jika ada permintaan, kita akan siapkan," ujarnya singkat. (Media Indonesia)

7. Pendemo Blokir KTT ASEAN

Loyalis mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra kemarin mengancam menggelar demonstrasi untuk memblokir (KTT) ASEAN di Thailand.

Kelompok "kaus merah" tersebut telah menggelar serangkaian demonstrasi sejak terpilihnya PM Abhisit Vejjajiva pada pertengahan Desember silam. Ancaman demonstrasi pada KTT ASEAN tersebut sebagai balas dendam karena menteri luar negeri kabinet Abhisit, Kasit Pirornya, juga terlibat dalam blokade Bandara Svarnabhumi dan menyengsarakan ratusan ribu wisatawan yang berujung pada pelengseran Somchai Wongsawat, PM Thailand saat itu yang juga ipar Thaksin.

"Kita akan menulis pesan kepada sembilan duta besar negara-negara ASEAN untuk meminta mereka menyampaikan pesan kita bahwa 'kaus hitam' tidak akan mengizinkan Menteri Luar Negeri Kasit Pirornya menyelenggarakan KTT ASEAN," ujar pemimpin loyalis Thaksin Jatuporn Prompan kepada AFP. "Kita tidak mengizinkan teroris Kasit untuk menggelar KTT.

Kita akan memobilisasi ribuan demonstran untuk berunjuk rasa agar menunjukkan rakyat Thailand tidak suka padanya," ungkap Jatuporn yang juga anggota parlemen dari kubu oposisi. KTT ASEAN aslinya diselenggarakan pada Desember lalu di Bangkok. Hanya saja, aksi blokade Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) di bandara internasional Svarnabhumi mengakibatkan KTT tersebut dibatalkan. PAD menuding pemerintahan lalu merupakan kepanjangan tangan Thaksin yang digulingkan pada kudeta militer 2006.

Abhisit meminta agar pendukung Thaksin tidak memblokir KTT tersebut dan seharusnya mereka menda-hulukan kepentingan negara. PM lulusan Universitas Oxford itu berharap KTT dapat terlaksana dengan sukses. "Saya ingin semua pihak mendahulukan kepentingan nasional," papar Abhisit. "Ini bukan hanya permasalahan pemerintah, tetapi menyangkut bangsa Thailand dan berdampak pada status Thailand sebagai Ketua ASEAN," imbuhnya.

PM Abhisit kemarin membahas jadwal baru untuk penundaan KTT ASEAN bersama kabinetnya. Abhisit membantah klaim oposisi bahwa negara-negara ASEAN tidak menyetujui Thailand menyelenggarakan KTT tersebut. Dia mengklaim bahwa perubahan tanggal disebabkan perbedaan pendapat mengenai jadwal penyelenggaraan. Sementara Menurut Sekretaris permanen Departemen Luar Negeri Virasakdi Futrakul, pada awalnya 10 anggota ASEAN setuju pertemuan diselenggarakan di Bangkok pada 27,28 Februari, dan 1 Maret.

"Menyelenggarakan KTT ASEAN menunjukkan bahwa Thailand telah kembali normal," papar Virasakdi. Namun, Virasakdi mengungkapkan, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru—pihak-pihak luar yang akan diundang pada KTT—meminta jadwal pelaksanaan diundur saja. "Akhir Januari adalah tahun baru China, pada Februari Jepang dan Singapura disibukkan dengan anggaran. Pada Maret, para pemimpin China masih disibukkan dengan pertemuan Kongres," ujarnya.

Menurut analis Asia Tenggara Michael Montesano, ketidakhadiran negara-negara besar dalam KTT ASEAN akan melemahkan posisi pertemuan tersebut. Dia menegaskan, ketidakhadiran negara-negara penting tersebut bakal menjadi bumerang bagi Bangkok. Sementara Deputy PM Suthep Thaugsuban yang bertanggung jawab dalam hal keamanan nasional berjanji bahwa KTT tidak akan dipindahkan jauh-jauh dari Bangkok. "Saya tidak akan memindahkan tempat KTT ke Phuket," katanya.

"Kelompok 'kaus merah' memang berusaha melakukan sebuah gerakan, tapi saya tidak berpikir bahwa langkah tersebut akan membuat anggota ASEAN memboikot KTT di Thailand," katanya. Saat demonstrasi PAD, pemerintah saat itu memindahkan tempat KTT dari Bangkok ke Chiang Mai, kota pendukung kuat Thaksin. Akhirnya, KTT tersebut ditunda pada tahun ini.

Di sisi lain, Pemerintah Thailand memblokir 2.300 situs internet karena dinilai menghina Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Thailand juga menanti persetujuan dari pengadilan untuk memblokir 400 situs lain. (Koran Sindo)

8. RI Sponsori Sidang Majelis Umum

Perang terbuka antara pasukan Israel dan Hamas pun semakin intensif. Indonesia akan mengaktifkan peranan 117 negara anggota Gerakan Nonblok untuk menggelar Sidang Darurat Majelis Umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menghentikan agresi Israel terhadap Palestina.

"Saya yakin seluruh anggota Gerakan Nonblok akan menyetujuinya karena posisi negara Nonblok mendukung perjuangan Palestina. Tidak menutup juga negara-negara anggota PBB yang lain," kata Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda di kantornya, Jakarta, Selasa (6/1).

Menurut Hassan, diperlukan mayoritas sebanyak-banyaknya untuk menggelar Sidang Darurat Majelis Umum PBB. Jumlah anggota Gerakan Nonblok 117 negara, sedangkan anggota PBB 192 negara.

Dalam seminggu terakhir Dewan Keamanan PBB telah bersidang secara informal dua kali guna membahas usulan resolusi terhadap Israel, namun belum menghasilkan sikap apa pun akibat veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap. Senin (5/1) waktu New York, usulan resolusi tersebut kembali dibahas di tingkat pakar Dewan Keamanan.

"Saya pesimis akan ada keputusan bulat atas resolusi Dewan Keamanan PBB karena adanya keberatan (Amerika) yang menganggap resolusi itu berat sebelah," kata Hassan.

Amerika sebagai sekutu Israel menganggap usulan resolusi yang disampaikan Mesir dan Libya tidak adil karena tidak memertimbangkan serangan roket Hamas ke Israel.

Israel beralasan agresi militer mereka ke Gaza untuk membalas serangan roket Hamas sejak Juni 2007. Indonesia menolak alasan Israel tersebut karena rakyat Palestina sebagai pihak yang dijajah lebih berhak membela diri dari serangan Israel dalam bentuk apa pun.

Menurut Piagam PBB tentang Uniting for Peace Resolution, Majelis Umum dapat mengadakan sidang darurat jika didukung sedikitnya dua pertiga anggota. Sidang akan mampu menghasilkan resolusi atas Gaza sebagai pengganti kegagalan resolusi Dewan Keamanan.

Indonesia lebih mengutamakan kaukus Nonblok daripada bergabung dengan Malaysia menggalang dukungan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di PBB. Selain karena 54 negara OKI juga termasuk kaukus Nonblok, Hassan menyatakan pilihan Indonesia ini menegaskan dukungan untuk Palestina berdasar solidaritas melawan penjajahan, bukan karena agama.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz al-Mehdawi mendukung rencana Indonesia. Menurutnya, rencana itu sejalan dengan maksud Palestina membawa insiden Gaza ke Sidang Umum jika Dewan Keamanan gagal bertindak. "Dukungan Indonesia dan negara-negara lainnya sangat kami hargai," kata Mehdawi.

Duta Besar Indonesia untuk PBB Marty Natalegawa mulai mendekati Mesir dan Turki. Mesir sebagai negara Arab utama yang selama ini aktif mengusahakan rekonsiliasi Hamas dan

Fatah di Palestina. Sementara Turki yang secara geografis berada di antara Eropa dan Timur Tengah diharapkan dapat menggalang dukungan Uni Eropa bagi Palestina.

DPR mendukung upaya pemerintah membawa masalah Gaza ke Majelis Umum. "Indonesia harus bisa memobilisasi negara-negara Non Blok untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil sikap dan keputusan untuk menghentikan agresi militer Israel," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Abdillah Toha.

Abdillah mewakili DPR akan berangkat ke Damaskus untuk menemui Ketua Parlemen Suriah dan Iran untuk melakukan langkah nyata bagi rakyat Palestina.

Yusron Ihza Mahendra, Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidani hubungan internasional, mengatakan Indonesia harus lebih mengintensifkan konsolidasi di forum internasional - tidak hanya dengan negara Islam, tapi juga negara Eropa dan Asia lain.

Perang Terbuka

Meskipun komunitas internasional terus mengimbau gencatan senjata, Israel justru semakin gencar menyerang Gaza kemarin (5/1). Hingga hari ke 12 agresi dan hari keempat serangan darat Israel, lebih dari 560 warga Palestina terbunuh, 100 di antaranya anak-anak. Sementara 2.700 orang luka-luka.

Israel bersikukuh melanjutkan operasi militer hingga tujuannya tercapai. "Hasil dari operasi ini haruslah bahwa Hamas tidak hanya berhenti menyerang, tapi juga tak mampu lagi menembakkan roket ke Israel," kata Perdana Menteri Israel Ehud Olmert.

Perang terbuka antara pasukan Israel dan Hamas pun semakin intensif. Senin (4/1) malam lalu, pasukan Israel bertempur dengan Hamas di pinggiran kota Gaza, distrik Shujaiya. Tiga prajurit Israel tewas dan 24 lainnya terluka dalam bentrokan ini.

Dengan senjata dan roket seadanya, Hamas berusaha mematahkan pasukan Israel yang menggunakan peralatan perang lengkap, termasuk kendaraan lapis baja dan helikopter. Israel melakukan lebih dari 40 serangan udara pada Senin malam untuk menembaki rumah-rumah anggota Hamas dan masjid.

"Israel melegitimasi pembunuhan anak-anak mereka sendiri dengan menewaskan anak-anak Palestina. Mereka telah melegitimasi kehancuran sinagoga dan sekolah mereka dengan menghantam masjid dan sekolah kami," kata pemimpin senior Hamas, Mahmud Zahar.

Tank Israel dilaporkan bergerak ke kamp pengungsian Bureij di pusat kota Gaza, Beit Hanoun dan Jabaliya. Perlawanan yang sengit dari Hamas juga terlihat di sana. Ledakan terdengar sepanjang malam. Namun, informasi mengenai kondisi Gaza sangat sulit didapat karena pasukan Israel melarang jurnalis asing memasuki kota tersebut.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dalam misi perdamaian ke Timur Tengah meminta kedua pihak segera melakukan gencatan senjata. Kemarin Sarkozy bertolak ke Damaskus untuk meminta Suriah membujuk pemimpin Hamas menerima gencatan senjata. Dia juga minta Israel menghentikan operasi militernya dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

"Kami, Eropa, menginginkan gencatan senjata secepat mungkin. Waktu terus berjalan. Serangan harus dihentikan dan harus ada gencatan senjata kemanusiaan temporer," kata Sarkozy kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah.

Israel, yang akan menghadapi pemilu parlemen 10 Februari mendatang, menyatakan prioritas utama Israel adalah mengamankan warganya dengan menghentikan serangan roket Hamas. Sementara Hamas meminta Israel segera menghentikan blokade yang membuat penduduk Gaza kekurangan makanan, bahan baker, dan obat-obatan.

Situasi di Gaza dilaporkan semakin memburuk. Seorang dokter asing yang bertugas di Gaza, Mads Gilbert, mengatakan bahwa rumah sakit di Gaza dan ruang operasinya telah penuh. Menurutnya, banyak orang yang akhirnya meninggal dunia akibat ketiadaan suplai obat-obatan. Sekitar 1,5 juta penduduk juga kini tak memiliki akses listrik.

"Mereka tidak mendapatkan air, tidak ada listrik, mereka kedinginan. Jendela dibiarkan terbuka untuk mencegah mereka terhantam saat terjadi ledakan bom," kata Dominic Utt dari lembaga *Save The Children* kepada *BBC*. "Anak-anak terkena hipotermia, mereka kekurangan gizi, tidak ada cukup makanan dan situasi semakin menyedihkan." (Jurnal Nasional)

I : .

NASIONAL

A. POLITIK

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

1. Jihadists the last thing Gaza needs: Minister

The government maintained Tuesday its stance of refusing to send Indonesian troops to the Gaza Strip despite mounting pressure from some Islamic groups to dispatch jihadists to the besieged Middle Eastern spot.

The Foreign Ministry said sending jihadists to Gaza to help Hamas fight Israel would not improve the situation, adding there were much more effective avenues Indonesia could take to help diffuse the situation.

A number of Islamic hardline groups, including the Islam Defenders Front (FPI) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), have said they wish to send volunteers to Gaza under the banner of jihad and have called on the government to support them.

"Is conducting a jihad effective? We must ask Gaza if that's what they need, and most probably they (don't). There are other more effective ways to help ... So far, sending jihadists isn't an option," Foreign Minister Hassan Wirayuda said.

AFP reported Tuesday that the 11-day-old Israeli offensive in the Gaza Strip had claimed the lives of at least 635 Palestinians and wounded 2,900 more.

The toll shot up Tuesday when Israeli fire hit three schools, killing at least 45 people.

Speaking in his annual statement to the press, Hassan said what Gaza needed most was medicine and medical assistance.

"We are looking at the possibility of sending medical workers to field hospitals in the Egypt area of Sinai, which borders with Gaza. We're awaiting clearance from Egypt, and the President has instructed the health minister to collect volunteers," Hassan said.

Despite agreeing that the Israeli attacks on the Gaza Strip had nothing to do with religion, Islamic groups in Jakarta have hyped up the conflict between the two religious groups, paving the way for the Islamic-based Prosperous Justice Party (PKS) and other Islamic groups to seize the momentum ahead of the April elections.

Observers on Tuesday criticized nationalist parties for not shouting down calls by Islam groups to send volunteers to the war, which was defined by President Susilo Bambang Yudhoyono on Monday as a clash over the sovereignty of territory between Palestine and Israel, and not a religious matter.

"The nationalist groups should be more active in voicing their stance as Indonesia's voice will be much more strong if the (the world) considers it to represent a pluralist Indonesia rather than only Islam," University of Indonesia international relations expert Hariyadi Wirawan said.

He said a pluralist Indonesia would attract more sympathy from major non-Muslim countries, such as members of the European Union (EU), as well as powerful human rights groups world wide that see the attacks as a territory dispute and a human rights tragedy rather than an attack against Islam.

PKS, the FPI and HTI seized the spotlight immediately after Israeli began the attacks when the groups gathered thousands of supporters in Jakarta and other big cities in the country to rally against Israel and the US.

Other political parties and nationalist groups did not take part in the rallies, and media coverage has refused to voice their stance on the conflict.(The Jakarta Post)

B. EKONOMI

:

1. Presiden: Coret Proyek yang Tak Ciptakan Lapangan Kerja

Jakarta-Pemerintah siap melakukan kebijakan stimulus fiskal demi mendukung tingkat pertumbuhan perekonomian, program perlindungan sosial, serta perbaikan kesejahteraan rakyat. Stimulus fiskal ini tercantum dalam Undang-undang (UU) APBN 2009. Selain program dan anggaran yang telah direncanakan di APBN 2009, pemerintah dimungkinkan untuk menambah stimulus fiskal dengan memanfaatkan dana lebih anggaran tahun 2008.

Bentuk counter cyclical atau stimulus pertambahan difokuskan pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK dengan perkuatan pembiayaan UMKM melalui KUR, peningkatan daya saing sektor riil, dan industri terpilih melalui insentif pajak dan bea masuk serta kegiatan yang mendukung infrastruktur padat karya.

Di sela-sela sambutannya saat penyerahan DIPA tahun 2009 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada menteri dan lembaga pemerintah nondepartemen agar memanfaatkan tambahan anggaran ini untuk kegiatan yang

menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan, seperti proyek infrastruktur. "Jika ada proyek dengan dampak yang rendah atau tidak berarti sama sekali terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan, saya minta Meneg PAN tidak segan-segan mencoretnya. Itu bisa ditunda tahun depan, tahun depannya lagi," tegasnya. (Sinar Harapan)

2. Ekspor 2009 Anjlok: Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Pertumbuhan

Pertumbuhan nilai ekspor diproyeksikan anjlok dari 18 persen pada 2008 menjadi sekitar 4,3 persen sampai 8 persen pada 2009. Proyeksi ini dibuat dengan memperhitungkan respons kebijakan terhadap resesi global. Tanpa ketepatan respons, penurunan akan lebih tajam.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Selasa (6/1), menjelaskan, pertumbuhan ekspor 2009 dibuat dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia, depresiasi nilai tukar rupiah, serta penurunan harga komoditas. Selain faktor eksternal, respons kebijakan yang sudah dan akan dilakukan pemerintah juga turut menentukan.

Tanpa respons kebijakan yang tepat, Departemen Perdagangan memperhitungkan, nilai ekspor nonmigas hanya akan tumbuh 0,9 persen.

"Berbagai upaya sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk tetap mendorong ekspor, antara lain dengan pembiayaan perdagangan, stimulasi investasi, diversifikasi pasar, perbaikan produksi, serta penguatan kerja sama perdagangan," tutur Mari.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah menyusun tiga skenario pertumbuhan nilai ekspor pada 2009. Berdasarkan skenario paling optimis, nilai ekspor nonmigas diperkirakan tumbuh 8 persen.

Pada skenario moderat, pertumbuhan diproyeksikan 6 persen. Pada skenario paling rendah, pertumbuhan nilai ekspor nonmigas 4,3 persen. Pemerintah masih akan terus meninjau proyeksi itu dengan mempertimbangkan perkembangan pasar internasional.

Pada World Economic Outlook, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan volume perdagangan dunia anjlok dari 4,6 persen pada 2008 menjadi 2,1 persen pada 2009.

Neraca perdagangan

Seiring dengan penurunan ekspor, pertumbuhan nilai impor Indonesia pada 2009 juga diproyeksikan turun signifikan. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan investasi, harga komoditas, dan laju ekspor.

"Karena penurunan impor, neraca perdagangan barang akan kurang lebih sama atau hanya sedikit lebih rendah dari tahun 2008," ujar Mari.

Meski melemah, permintaan terhadap produk primer seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan kakao dari Indonesia relatif tetap tinggi.

Indonesia juga berpeluang mengoptimalkan pengalihan pembelian dari China, antara lain untuk produk alas kaki, garmen, makanan olahan, dan mainan anak.

Menyikapi perlambatan pertumbuhan ekspor akibat resesi global, menurut Mari, menjadi amat penting untuk menjaga sumber pertumbuhan dari dalam negeri. (Kompas)

3. Ekspor Perikanan Naik 13,3%

Realisasi ekspor produk perikanan pada 2008 mencapai USD2,560 miliar, atau mengalami kenaikan sekitar 13,3% jika dibandingkan ekspor 2007 yang mencapai USD2,258 miliar.

Sementara itu, volume ekspor mencapai 895.000 ton atau naik sekitar 5% jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 854.328 ton. "Kita tetap optimistis tahun ini realisasi ekspor akan meningkat, atau paling tidak sama dengan tahun 2008," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Martani Husaeni di Jakarta kemarin.

Martani mengungkapkan, prospek pasar ke depan akan berubah terkait banyaknya permintaan dari negara-negara Eropa Timur dan Timur Tengah serta menurunnya pasar AS. Menurutnya, negara di dua kawasan tersebut pasarnya masih sangat terbuka, terutama untuk jenis ikan murah seperti bandeng, kerapu, dan kepiting. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

1. **2009 another 'tough year' for human rights campaign**

The country faces yet another tough year in 2009 in promoting human rights, with the issue of elections likely to drown out all others on the national scene, the Indonesian Legal Aid Institute (YLBHI) warned Tuesday.

YLBHI chairman Patra M. Zen said at a press conference that unresolved rights violations cases throughout 2008 would set a bad precedent for efforts to uphold basic rights this year.

Patra was referring to, among others, the recent acquittal of former top spy Maj. Gen. (ret) Muchdi Purwopranjono of all charges in the murder of rights activist Munir Said Thalib, and the interminable delay in compensation payments for victims of the Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo, East Java.

"Rights issues will be put aside and submerged amid the public uproar ahead of the polls, starting from the legislative election on April 9. Political parties will only talk about human rights in their political jargon or as a tool to help boost their image," Patra said.

However, Foreign Minister Hassan Wirajuda told a press briefing the recent verdict exonerating Muchdi would not tarnish Indonesia's image at the international level.

"So far we have not received any statement of concern or apprehension from any party *over Muchdi's acquittal*. This has not been a problem because legal matters are entirely a domestic affair," he said.

But Patra insisted Indonesia's failure to settle past gross human rights abuses allegedly involving some of the country's top politicians could exacerbate the progress made in upholding human rights principles in the country.

The failure to put rights criminals in prison, he went on, meant they would stand a greater chance of retaining control over the country and thus shielding themselves from possible criminal investigations related to the rights abuse cases.

In a report distributed to the media, the YLBHI said that throughout 2008, the government successfully put out more regulations than in the previous year, but noted some of these, including the election laws, the electronic information and transaction law, the education legal entity law and the anti-pornography law, could potentially threaten individual rights.

The report also said the police and prosecutors office were the two state institutions most complained about to the legal aid institute for alleged minor rights abuses, while the Constitutional Court and the National Commission on Human Rights were among the most trusted institutions in 2008.

The report also named several departments as causing "impediments" to rights efforts in Indonesia, including the Justice and Human Rights Ministry, the Attorney General's Office, the Public Works Ministry, the Health Ministry, the House of Representatives, courts and the Foreign Ministry.

Patra also praised the government for finally allocating 20 percent of the state budget to education in 2009, but warned of poor implementation.

"We suspect the increased budget is mostly to improve the image of the current government. For instance, it may spend only a little to reconstruct school buildings, but much more to advertise its action. (The Jakarta Post)

D. **HANKAM**

:

1. **Dubes RI "Camping" di Barak Konga**

Kunjungan Duta Besar RI di Lebanon, Bagas Hapsoro beserta rombongan ke Sudirman Camp, Senin lalu, untuk merayakan tahun baru bersama prajurit Garuda serta merasakan camping (menginap -- Red) di barak prajurit Garuda (Konga XXVI-A/Unifil). Pelaksanaan acara tahun baru di Sudirman Camp dikemas secara sederhana, tapi meriah itu, didahului dengan makan malam bersama dilanjutkan acara lawak dan nyanyian dengan kolaborasi band personel Konga XXV-A dan staf Kedutaan Besar RI di Lebanon.

Pada kesempatan itu, Duta Besar RI menghadiahkan alat kebugaran berupa satu unit treadmill. Sementara dari Ny Bagas Hapsoro atas nama Dharma Wanita KBRI memberikan Al-Quran dan perlengkapan shalat. **(Seno A)**

2. **KRI Teuku Umar Gagal Pembajakan**

JAKARTA - Kapal Perang (KRI) Teuku Umar-385 dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Armada RI Kawasan Barat berhasil menggagalkan aksi pembajakan kapal KM Jin Man Chermng CT 4-2506. Demikian dijelaskan Pangarmabar Laksamana Muda Soeparno kepada wartawan usai bertindak sebagai inspektur upacara sertijab Komandan Lantamal III Jakarta, Selasa.

Awal mula terjadinya pembajakan kapal diketahui pada tanggal 2 Januari 2009. Koarmabar TNI AL menerima informasi bahwa telah terjadi pembajakan/penguasaan terhadap KM Jin Man Chermng CT4-2506.

Kapal KM Jin Man Chermng CT4-2506 yang berbobot 110 GT merupakan jenis Kapal Ikan Asing (KIA) dengan tanda selar CT4-2506-BJ4506. Setelah dibajak, kapal mengarah ke samudera India menuju ke Padang.

Pada 5 Januari pukul 17.00, KRI Teuku Umar-385 berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan KM Jim Man Chermng di sebelah barat laut perairan Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan berbagai pelanggaran antara lain tidak memiliki dokumen kapal. Sampai saat ini barang bukti berupa kapal dan ABK dikawal ke pangkalan TNI AL di Jakarta guna proses hukum lebih lanjut. (Suara Karya)

E. **HUKUM**

1. **PREDIKSI YLBHI: Penegakan HAM 2009 Makin Buruk**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, penegakan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2008 mandeg.

Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan politik dari pemerintahan, sehingga berakibat munculnya kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat, korban, dan keluarga korban.

YLBHI memprediksi, penegakan HAM pada tahun 2009 tidak akan lebih baik bahkan kemungkinan akan semakin buruk.

Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI Agustinus Edy Kristianto di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (6/1).

Agustinus yang didampingi Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen, Direktur Riset dan Pengembangan YLBHI Zainal Abidin menegaskan, penegakan HAM pada tahun 2009 akan tersingkir seiring dengan kesibukan pemerintah dan DPR menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu).

"Isu HAM hanya dijadikan jargon oleh partai politik untuk menaikkan citra dan kepentingan kekuasaan. Seharusnya, negara tetap menjamin, melindungi, dan mewujudkan pemenuhan HAM bagi warga negara sebelum, selama, dan sesudah Pemilu 2009 dengan komitmen dan kesadaran penuh bahwa hal itu merupakan prinsip dasar HAM universal," ujarnya.

Agustinus meminta agar para aktor negara ini tidak menjadikan rakyat sebagai korban politik pencitraan demi kepentingan meraih kekuasaan pada Pemilu 2009. Ia juga meminta masyarakat agar berhati-hati dan cerdas mencermati para caleg dan pucuk eksekutif, ketika hendak menentukan pimpinan pada Pemilu mendatang.

Sementara itu Patra M Zen mengatakan, peralihan tahun 2008 ke tahun 2009, akan menjadi saat yang sangat berat dalam hal penegakan HAM. Ia menilai, telah terjadi kemandekan pada tahun 2008. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari proses hukum terhadap kasus pembunuhan Munir yang membebaskan terdakwa Muchdi Pr.

"Pemilu 2009, akan menjadi pesta demokrasi di tengah keterpurukan kondisi ekonomi rakyat. HAM diprediksi hanya akan menjadi jargon untuk menaikkan citra pemerintah yang mengakibatkan substansi penegakan HAM akan mengalami penyingkiran oleh pelaku politik dan aktor-aktor kekuasaan," ujarnya.

Terkait dengan mandeknya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, Patra meminta pemerintah (Kejaksaa Agung-Red) agar meneruskan proses hukum semaksimal mungkin atas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih terlunta-lunta.

Patra menambahkan, pihaknya tahun ini secara khusus memberikan perhatian pada dua hal. Pertama, menyangkut postur APBN 2009, khususnya alokasi anggaran bidang hukum dan HAM, yang bisa dijadikan alat untuk mengelabui masyarakat dan menaikkan citra kelompok tertentu untuk kepentingan Pemilu 2009.

Kedua, menyoroti pola sirkulasi kekuasaan yang dihasilkan lewat Pemilu 2009, yang diprediksi tidak akan jauh berganti dari rezim lama. Sempitnya ruang pergantian kekuasaan tersebut, akan menambah panjang kurun waktu mandeknya penegakan HAM pada tahun yang akan datang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Zainal Abidin mengatakan, kelemahan yang terjadi pada proses penegakan HAM di tahun 2008, dikarenakan meningkatnya produk kebijakan yang isinya justru mengancam HAM. (Suara Karya)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Responses to Gaza crisis: Self-restraint is needed (by Al Makin)

The following may portray the way in which the Indonesian public has responded to the Israeli strikes on Gaza:

- 1) Condemning the "unjust war" (*The Jakarta Post*, Dec. 30, 2008) and expressing condolences to its victims;
- 2) Showing solidarity and making donations, which resulted in humanitarian aid along with the Indonesian Emergency Rescue Committee (MER-C) that reached Amman, Jordan, on Jan. 4;
- 3) Holding mass protests in many Indonesian cities; and
- 4) Urging Indonesian Muslims to boycott U.S. products (*The Jakarta Post*, Dec. 30, 2008).

The first response which emerged from various Indonesian societal groups -- politicians, intellectuals and religious leaders -- and which we have been bored with since the third day of the crisis, has demonstrated good educational reasoning.

Fortunately President Susilo Bambang Yudhoyono, Azyumardi Azra (a Muslim intellectual) and Umar Shihab (of the MUI/Indonesian Ulema Council) all mentioned in their statements that any conflict or violence, regardless of its perpetrators, harms the most essential virtues of humanity.

In particular, Shihab and Azra both emphasized that it is our sense of humanity (not just solidarity among Muslims) that should lead us to show our concerns with the military operation whose victims already included hundreds dead and around 1,000 injured.

Shihab also warned of the irrelevance of the idea of a jihad to Palestine, as proposed by a certain radical group.

The second response -- which included emails circulating on certain mailing lists, attempting to appeal to our empathy with a picture of a dying women and her son -- was also helpful to Gaza victims. The good thing is this solidarity materialized in the form of a humanitarian mission.

Regarding the third and fourth responses, we need to restrain ourselves. As we have seen in many cases in the past, religious sentiments in the Indonesian public are easily exploited by certain radical groups, which always seem ready to grab onto any momentum they can.

As we have seen in the news, certain radical groups, which have already earned public condemnation (due to either their violent track records or extremist ideologies) are now exercising their maneuvers. They are regurgitating the same old rhetoric of hate and blind suspicion -- that enemies are everywhere and have made a conspiracy to destroy Islam and all Muslims around the world. The magnitude of danger of such provocation we have experienced already.

Similarly, not only does the call to boycott U.S. products fail to address the real problem, it also offers no solution. Rather, it creates another bigger problem. We have experienced this already too. It is worth recalling that due to some popular calls in protests over Dutchman Geert Wilders' movie, *Fitna*, Youtube was blocked in Indonesia, an action which caused nothing but disadvantage to many Indonesians.

As a consequence, we saw how isolated the Indonesian online community became without Youtube, didn't we?

In a similar vein, the call for Indonesians to boycott U.S. products will bring about more damage to our economy which we are struggling to salvage from the brink of everlasting crisis.

As experiences should teach us, we need to be more cautious in stirring public religious emotion in the form of mass rallies, and particularly in isolating perspectives.

It is better to call on the public to remain sober, restrained, moderate and peaceful in expressing their empathy.

Once again, it is unwise to lean excessively toward one extreme or side with one party with a one-sided perspective. Indeed, it is not easy to expose two balanced perspectives. On the contrary, sticking with popular views with popular support seems comfortable and beneficial.

The Gaza crisis -- and the Israeli-Palestinian conflict in general -- whose matters are complex and delicate, requires a workable solution. And yet Indonesia, whose Muslim population is the largest in the world, may -- and has tried to -- play a certain role in seeking this, although we Indonesians do not necessarily fully understand the core dilemma, e.g. between Hamas, Fattah and Israel.

But Indonesia, in terms of location, is far away from the conflict zone, a fact which may offer a rather unique insight.

Radicalism in Indonesia, which has been triggered by (among other things) the Israeli-Palestinian conflicts, is never a solution but adds to the problems.

Solidarity for injustice can lead to at least two conflicting actions: generous alms giving or extremism. Regarding the latter, let us recall the interviews with Imam Samudra (who was executed for his role in the Bali Bombings) which are still available online.

In one such interview, Samudra wears a blue shirt with no collar, and a black scarf around his head, and expresses his bitter disappointment with the current global political situation which is full of injustices, he says. Samudra repeatedly says the "enemy" has conspired to destroy Islam and Muslims, citing the Iraq and Afghanistan wars.

It stands to reason to expect that certain radicalists will soon claim their violent acts in the name of Gaza victims, even in places far removed from the conflict zone. The perceived present injustice may indeed trigger radicalism as history and religion seem only to serve as safe havens for radicalist arguments.

As recorded in many interviews with Samudra, he rarely cites verses of the Koran or hadiths which, if he had, could have served to enhance his first argument, namely his perception of injustice.

Here, wisdom and a cautious approach will help us to play a better role in seeking a solution. At the same time, we must restrain ourselves from radicalizing grass-roots groups for any purpose or interest. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. **Bola di Tangan Pakistan**

Tragedi Mumbai. Begitulah orang menyebut peristiwa di luar batas kemanusiaan oleh 10 teroris di Mumbai, November tahun lalu.

Aksi brutal di dua hotel, stasiun kereta api, dan pusat kebudayaan Yahudi itu menewaskan 171 orang, termasuk sembilan dari 10 teroris, dan melukai sejumlah orang. Apa yang terjadi di Mumbai, ketika itu, membuat hati kita bergetar. Kita tidak habis mengerti mengapa masih ada orang yang gelap mata dan tanpa hati dengan enteng menghilangkan nyawa orang lain.

Yang lebih mencemaskan lagi, saat itu, tragedi Mumbai itu dikhawatirkan akan menjadi dadakan meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan. Dua negara yang pernah tiga kali terlibat perang besar.

Kekhawatiran itu muncul lantaran sejak hari pertama tindak terorisme itu terjadi ada indikasi bahwa para teroris memiliki hubungan dengan sebuah kelompok garis keras di Pakistan. Disebut-sebut kelompok itu bernama Lashkar e-Taiba yang berpusat di sebuah tempat di Pakistan.

Kecurigaan India itu kini diperkuat sejumlah bukti yang diperoleh intelijen India, data komunikasi lewat telepon satelit yang berhasil dilacak kembali, dan GPS (global positioning system) yang ditemukan polisi di kapan nelayan yang dibajak para teroris. Polisi India juga

memperoleh bukti keterlibatan sebuah organisasi di Pakistan dari hasil interogasi dengan seorang teroris yang selamat.

Semua bukti itu kini sudah diserahkan Pemerintah India kepada Pakistan. Dengan menyerahkan bukti-bukti itu, India berharap Pakistan bisa diajak bekerja sama untuk menindak mereka yang diyakini bertanggung jawab atas tragedi Mumbai. Setelah penyerangan Mumbai, Pakistan memang segera menangkap sejumlah pemimpin Laskhar e-Taiba, sebuah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Pakistan pada tahun 2002, tetapi tetap operasi.

Karena itu, India kini berharap dapat memperoleh hasil investigasi yang sudah dilakukan Pakistan, termasuk informasi yang berhubungan dengan pelatihan, perekrutan, dan pendanaan terhadap organisasi itu. Rasanya tidak berlebihan kalau India berharap semua itu.

Kerja sama di antara kedua negara untuk menghadapi dan menindak kelompok teroris di kawasan itu amat penting. Hal itu akan mengurangi sensitivitas ketegangan hubungan India-Pakistan yang cenderung mudah meningkat, apalagi sekarang tambah rumit karena komplikasi atas ancaman bahaya terorisme.

Kita berharap hasil investigasi India tentang tragedi Mumbai yang sudah diserahkan kepada Pakistan bisa menjadi sarana membaiknya hubungan kedua negara, yang hampir tidak pernah berbaikan sejak berpisah tahun 1947. Membaiknya hubungan kedua negara akan berdampak positif terhadap kawasan, tidak hanya Asia Selatan, tetapi juga Asia Tenggara. (Kompas)

Jakarta, 7 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu